



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi : merencanakan program pengawasan; merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 yang sudah diubah kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.



**Membantu Bupati
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Di Bidang Pengawasan**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi :

Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengawasan Daerah

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah
3. Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan
4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah

1.2 Sistematika Penulisan

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**, secara umum menguraikan latar belakang penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, gambaran umum OPD, tugas pokok dan fungsi OPD

Bab II **Perencanaan Kinerja**, menguraikan beberapa hal penting terkait Perencanaan Strategis (Visi, Misi, rencana Kinerja tahunan, Program/kegiatan Utama, Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2017) dan Perjanjian Kinerja

Bab III **Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018**, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, realisasi kegiatan yang terkait Renstra, IKU, Penetapan Kinerja serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan serta upaya dalam menghadapi kendala ataupun hambatan yang dihadapi

Bab IV **Penutup**, menguraikan kesimpulan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 serta masukan dan saran kedepannya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud, menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

Visi adalah gambaran kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan dengan mengacu kepada terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah **“Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem”**

Penjelasan Visi :

Visi Inspektorat mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi kunci yakni ;
Pengawasan : Mengandung makna bahwa Inspektorat Daerah adalah Institusi pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karangasem yang secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Karangasem



Berkualitas dan Profesional : mengandung makna bahwa setiap aparat pengawasan akan selalu meningkatkan kapabilitasnya sehingga memiliki *core competency* dan dalam setiap pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem : mengandung makna secara implisit tersirat bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewajiban moral sebagai Aparat pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk berada pada *front line* perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

2.1.2 Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :

- 1. Mewujudkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem yang baik**
- 2. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang Prima sesuai standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah**

2.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

program PD. Adapun tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tujuan dan sasaran OPD adalah terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan strategi mencapainya

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapaian Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program	
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko diarahkan ke hal-hal yang mempengaruhi opini BPK RI	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Hasil AKIP Pemda Karangasem oleh Kementerian PAN dan RB Prosentase OPD yang akuntabilitasnya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	Penyusunan perencanaan kinerja mendapat verifikasi dari Inspektorat Daerah Mengalokasikan SDM yang handal dalam perencanaan kinerja	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
	Terwujudnya SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Prosentase Rekomendasi temuan OPD akibat kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
			Prosentase rekomendasi temuan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti			
			Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	Meningkatkan jumlah sidak dari tahun sebelumnya	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan yang bersumber dari pengaduan masyarakat	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

	pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan				
	Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan dan P2UPD yang bersertifikat tingkat madya	Menganggarkan dana diklat di Inspektorat Daerah	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Rencana kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masuk : Jumlah dana	Rupiah	179.994.553,97	
					Keluar : Jumlah laporan hasil pemantauan	Laporan	2	
					hasil : Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	80%	
				Pengawasan Fungsional (Reguler)	Masuk : Jumlah dana	Rupiah	203.266.060	
					Keluar : Jumlah LHP fungsional/reguler yang diterbitkan	LHP	48	
					hasil : Prosentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sesuai dalam LHP	%	80%	
Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawa	- Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	90%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masuk : Jumlah dana	Rupiah	179.994.553,97	
					Keluar : Jumlah laporan hasil pemantauan	Laporan	2	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

s Internal dan Eksternal	- Prosentase Jumlah kasus kerugian Negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti				hasil : Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	80%	
SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP :	70	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Evaluasi Lakip OPD Tahun 2014	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	15.918.365	
	hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB				Keluaran : Jumlah OPD yang Akipnya dievaluasi	OPD	16	
	Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah				hasil : Psosentase OPD yang Akuntabilitas kinerjanya memperoleh kategori minimal B oleh Inspektorat Daerah	%	72%	
SPIP yang efektif dan Ketaatan aparaturnya terhadap Peraturan Perundang-undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	- Prosentase rekomendasi atas temuan kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	WTP	Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pelaksanaan SPIP Kabupaten Karangasem	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	92.143.100	
	- Prosentase rekomendasi dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang selesai ditindaklanjuti				Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek SPIP	Orang	51	
					hasil : Prosentase Peningkatan pemahaman peserta bintek tentang SPIP	%	95%	
	- Meningkatkan ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	90%	Peningkatnya ketaatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Inspeksi Mendadak / Sidak	Masukan : Jumlah dana	rupiah	51.721.200	
					Keluaran : Jumlah Sidak Absen di Lingkungan Pemkab. Karangasem	kali	24	
					hasil : Prosentase peningkatan ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas pokok	%	92	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

					dan fungsi OPD			
Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam pengaeasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	100%	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat	Masukan	: Jumlah dana	Rupiah	33.214.800
					Keluaran	: Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Kasus	96%
					hasil	: Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Kasus	96%
Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	65%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Pelatihan di Kantor Sendiri	Masukan	: Jumlah dana	Rupiah	317.111.800
					Keluaran	: Terselenggaranya Pelatihan di kantor sendiri	Kali	36 Kali
					hasil	: Prosentase peningkatan pemahaman APIP tentang Pengawasan	%	95%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 disajikan pada tabel 2.3 dibawah :



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

FUNGSI : Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebagai berikut :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah
4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran strategis/Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan	Sumber Data	Ket.
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Diukur dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem apakah WTP, WDP, TMP, TW	LHP BPK RI atas LKPD Pemkab. Karangasem	
Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	- Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	- Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan BPK RI. Diukur dari =(Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi) x 100	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan eksternal	
		- Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan Inspektorat Daerah. Diukur dari =(Jumlah temuan Inspektorat Daerah	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan internal	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

		yang telah ditindaklanjuti/jumlah total temuan) x 100		
	- Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti	- Menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah yang selesai ditindaklanjuti. Diukur dari (jumlah kasus kerugian negara/daerah yang telah ditindaklanjuti/ jumlah total temuan) x 100	Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas penyelesaian ganti kerugian Daerah	
Terwujudnya SAKIP yang Akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - Hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB	Diukur dari hasil penilaian LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB	Hasil Evaluasi LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB	
	- Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	Diukur dari nilai rata-rata Evaluasi LAKIP OPD dengan Formula Nilai Rata-rata evaluasi Lakip OPD disampel = (jumlah Nilai evaluasi LAKIP SKPD disampel yang nilainya minimal B)/(jumlah nilai LAKIP OPD disampel) x 100%	Laporan Hasil Evaluasi Lakip oleh Inspektorat Daerah	
Terwujudnya SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	- Prosentase Rekomendasi temuan akibat kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	- Diukur dari jumlah rekomendasi atas SPI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas SPI	
	- Prosentase rekomendasi temuan terhadap ketaatan peraturan	- Diukur dari jumlah rekomendasi dengan temuan terhadap ketaatan peraturan perundang undangan yang selesai	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas peraturan perundang	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

	perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti	ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi x 100%	undangan	
	- Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	- Menunjukkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh APIP. Diukur dari prosentase tingkat kehadiran PNS = (% TK PNS = (Jumlah PNS yang Tanpa Keterangan/Jumlah PNS disidak) X 100%	Laporan hasil sidak di Lingkup Pemkab. Karangasem oleh Inspektorat Daerah	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat, diukur dari : jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bagi jumlah pengaduan yang masuk di kali 100%	Laporan hasil pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Daerah	
Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	Diukur dari Jumlah Auditor dan P2UPD yang mengikuti Diklat dan mendapatkan sertifikat tingkat Madya di bagi jumlah auditor dan P2UPD x 100%	Data Kepegawaian pada Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Karangasem.	

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 ditetapkan dalam Penetapan Kinerja seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2018

NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
----	-------------------	-------------------	--------	---------	----------	----------



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

1	Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	179.994.553,87
					Pengawasan fungsional (reguler)	203.266.060
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti - Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti 	80%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	179.994.553,87
			90%			
3	SAKIP yang akuntabel di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase PD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah 	62	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Evaluasi LAKIP SKPD	15.918.365
			70%			
4	SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase rekomendasi temuan PD akibat 	75%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	92.143.100



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

	terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti - Prosentase rekomendasi temuan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti - Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD	75%	Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintah (SPIP) Kab. Karangasem	
			90%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Inspeksi Mendadak /Sidak	51.721.200
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat	85%	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat	33.214.800
6	Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase Auditor dan P2UPD yang bersertifikat Tingkat Madya	63	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan kompetensi APIP dan pelatihan di Kantor Sendiri	317.111.800



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 maupun RKT Tahun 2018. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem ini didasarkan pada Penetapan Kinerja yang terdiri dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja (out comes).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara luas dan mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
1	Pengelolaan Keuangan dan aset PD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

2	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	80,00%	100%
		Prosentase Jumlah kasus kerugian Negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti	90%	92,28%	102,52%
3	SAKIP yang akuntabel di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB	62	67,38	108,67%
		Prosentase PD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	72%	61,25%	84,72%
4	SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Prosentase rekomendasi atas temuan kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	75%	100%	133,33%
		Prosentase rekomendasi dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti	75%	80%	106,66%
		Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD	90%	100%	111,11%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaeasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	85%	100	117,64%
6	Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	63,00%	61,54%	97,68%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan.



Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Karangasem berupa Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Inspektorat Daerah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran I. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD yang efektif efisien dan akuntabel

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
1.	Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD yang efektif efisien dan akuntabel	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP

Sumber data : LHP BPK RI atas LKPD 2018

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Merujuk pada Buletin Teknis SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah , paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut :

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang diberlakukan dalam SPKN, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambah suatu paragraf penjelas dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materila sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak-dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- c. Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Karangasem telah diperiksa Laporan Keuangannya oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Dari tahun ketahun terdapat perkembangan opini yang diperoleh. Berikut disajikan opini yang diperoleh Pemkab. Karangasem dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Provinsi Bali.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Tabel 3.2.1 Perkembangan opini entitas Pemerintah Daerah pada Provinsi Bali

NO	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018
1	Prov Bali	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Badung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangli	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Karangasem	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Klungkung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Iktisar LHP BPK RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, BPK RI Perwakilan Bali telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Pemeriksaan BPK RI tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas pemeriksaan tersebut pada Tahun 2018, BPK RI Perwakilan Bali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2017. Hal yang bersifat material yang masih dikecualikan adalah :

1. Sistem Pengendalian Intern.

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan di beberapa SKPD.

2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Sasaran II. Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%
		Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	100%	100%
		Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	92%	100 %	108,69%

Sasaran III. Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
3.	SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB	62	67,38	108,67%
		-Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah	72%	61,25%	84,72%

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra/RPJMD.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu- isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil.
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dalam LAKIP.
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi pemerintah.
- g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen- komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4.1. Katagori penilaian evaluasi Lakip

No	Kategori	Semula	Menjadi	Interpretasi
1	AA	>85-100	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>75-85	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	'-	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja baik, memiliki sistem Manajemen Kinerja yang andal
4	B	>65-75	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-65	>50-60	Cukup(memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	0-30	Sangat Kurang, Sitem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

				manajemen kinerja; Perlu bayak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
--	--	--	--	--

Kementerian PAN dan RB melakukan supervisi atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh beberapa inspektorat provinsi terpilih terhadap pemerintah kabupaten/kota. Supervisi yang dilakukan tersebut mencakup penentuan kabupaten/kota yang dievaluasi, pendampingan pada pelaksanaan evaluasi, reviu terhadap hasil evaluasi, penulisan laporan hasil evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi. Pendampingan dan reviu terhadap hasil evaluasi dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 Lakip Pemkab. Karangasem telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan Nilai **66,24 B** (Akuntabilitas kerjanya sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan). Baru di Tahun 2018 Karangasem dievaluasi dengan mendapatkan nilai **67,38** atau **B** (Akuntabilitas kerjanya sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

Sasaran IV. Terwujudnya SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem

Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
4	SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem	Prosentase rekomendasi atas temuan kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti	75%	100%	133,33%
		Prosentase rekomendasi dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti	80%	80%	100%
		Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap	92%	100%	108.69%



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

		pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD		
--	--	---------------------------------------	--	--

Sasaran V. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaeasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaeasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	96%	100	104,16 %

Dari Jumlah Pengaduan yang masuk dan selesai di tindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Tahun 2017 dari target 85% kasus, sedangkan pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 117,64%., sedangkan di tahun 2018 dari target 96% kasus, sedangkan pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 104,16%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran V terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.1 Perbandingan Pencapaian sasaran V tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja (%) Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaeasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti	85%	100	117,64 %	96%	100	104,16 %



Sasaran VI. Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran VI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
6	Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	63,00%	61,54%	97,68%

Dari data kepegawaian di Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem ditemukan prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat madya di tahun 2017 adalah 61,54% dari target 63%, sehingga capaian kinerjanya 62,50% sedangkan di tahun 2018 adalah 61,54% dari target 63%, sehingga capaian kinerjanya 97,68%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran VI terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.1 Perbandingan Pencapaian sasaran VI tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja (%) Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja (%) Tahun 2018
6	Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya	63%	62,50%	99,20%	63%	61,54%	97,68%

Pengukuran Kinerja Kegiatan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan pemeriksaan reguler/fungsional dengan indikator kinerja :

Indikator output : Jumlah pengawasan reguler dengan target 48 obrik. Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada 48 obrik atau telah mencapai 100%.

b. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemkab. Karangasem Tahun 2018 dengan indikator kinerja :

Indikator output : Jumlah laporan reviu laporan keuangan Pemkab. Karangasem dengan target 1 laporan. Dari target kinerja tersebut, di tahun 2018 dilaksanakan reviu laporan keuangan Pemkab. Karangasem sehingga kinerjanya mencapai 100 % dari target yang direncanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Indikator outcome : Prosentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Dari hasil pelaksanaan reuiu laporan keuangan oleh tim didapatkan bahwa semua OPD telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP atau pencapaian kinerja mencapai 100 %.

- c. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Kabupaten Karangasem, dengan indikator kinerja :

Indikator output : Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dengan target 1 laporan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghasilkan laporan yang menunjukkan kualitas pencapaian SPIP Pemkab. Karangasem. Kegiatan ini telah didukung dengan pedoman yang jelas, namun kegiatan ini merupakan kegiatan baru sehingga dalam pelaksanaannya baru tahap pelatihan dalam penilaian maturitas SPIP. Dari target tersebut telah dilaksanakan kegiatan tersebut dengan menghasilkan laporan sebanyak 1 laporan, sehingga capaian kerjanya mencapai 100 %.

- d. Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja :

Indikator output : Jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti oleh aparat pengawas (APIP) di Tahun 2018 dari target 96% pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti mencapai 100% sehingga capaian kerjanya mencapai 104,17%.

Indikator outcome : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang masuk dengan target kinerja 96% pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti sebanyak 100%, sehingga capaian kerjanya mencapai 104,17 %. Pendukung dari pencapaian kinerja adanya komitmen pimpinan dalam menampung dan menyelesaikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui pengaduan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dimonitor oleh masyarakat dan tidak berkembang menjadi anarkis. Namun kadang-kadang pengaduan yang masuk sifatnya kepentingan pribadi sehingga tidak perlu ditindaklanjuti.

Dari tabel diatas terlihat kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran I sampai dengan sasaran VI relatif baik yaitu rata-rata capaian kerjanya 108,15%. Kinerja kegiatan



ini perlu ditingkatkan dan supaya lebih optimal kedepannya perlu diterapkan manajemen informasi hasil pemeriksaan berbasis komputer.

Faktor – faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.
3. Adanya kerja sama yang baik antara ITDA Kabupaten Karangasem dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.

Kendala – kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :

1. Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan dari Tim Pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan.
2. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
3. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena sarana dan prasarana yang terbatas seperti, laptop dan computer PC.
4. Masih kurangnya anggaran diklat sehingga menyebabkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kurang memadai. Hal tersebut juga menyebabkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem masih di level 2.
5. Belum terpenuhinya 3 P (Pembiayaan, Personil, Prasarana). Untuk pembiayaan untuk pelaksanaan pengawasan yang kurang, dimana belum bisa dialokasikan untuk semua obrik (obyek pemeriksaan) yang ada atau baru sekitar 31,66 % (48 obrik dari 152 obrik yang ada), jadi setiap 3,2 tahun sekali baru bisa dijadwalkan ke obrik yang pertama, yang dijadwalkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko, serta jumlah tenaga pemeriksa Auditor dan P2UPD masih sangat terbatas.



6. Masih adanya keengganan dari OPD untuk diperiksa, dan kurang proaktif untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan/pembinaan, sehingga temuan yang sama sering kali muncul kembali pada pengawasan selanjutnya. Kondisi ini menimbulkan kesan kurang berhasilnya pembinaan yang dilakukan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

1. Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
2. Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
3. Menindaklanjuti Data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
4. Mengusulkan penambahan 3P (Pembiayaan, Personil, Prasarana) untuk tahun berikutnya.
5. Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada OPD bahwa Inpektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
6. Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

3.3. Realisasi Anggaran

Tahun 2018, aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2018, mencapai **Rp.** 6.996.704.895,00 atau 97,05% dari Jumlah yang dianggarkan.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim. Dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu efektif dan efisien.



2. Akuntabilitas keuangan secara lengkap dan rinci, dipertanggung jawabkan melalui mekanisme Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Government) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 – 2021 dan merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, hanya 7 indikator yang mencapai target yaitu :
 - a. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari dari target WTP dan terealisasi WTP;
 - b. Prosentase kasus kerugian Negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti dari target 90% dan terealisasi 92,28%;
 - c. Skor AKIP Pemda Kabupaten Karangasem dari target 62 terealisasi 67,38;
 - d. Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti 96% terealisasi 100%.



- e. Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi PD target 92% dan terealisasi 100%

4.2 Saran

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 belum optimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk itu diperlukan strategi yang lebih baik untuk mencapainya. Tidak kalah pentingnya kapabilitas Inspektorat Daerah perlu ditingkatkan dengan mengalokasikan SDM pengawasan yang lebih kompeten karena peran yang diemban sebagai penjaminan kualitas, mengawal dan bertindak sebagai konsultasi bagi OPD lain. Tentunya dengan peran seperti ini kualitas dan kuantitas di Inspektorat Daerah mestinya + 1 dibandingkan dengan OPD lainnya.